

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Aplikasi Trading Binomo

Marvin Asteres Vice Watumlawar<sup>1</sup>, Krisnadi Nasution<sup>2</sup>

Article history: Received: 26 juni 2023, Accepted: 30 Desember 2023,  
Published: 18 Maret 2024

**Abstract** Trading in general is a basic economic concept that includes buying and selling of goods and services. Profits from trading activities are obtained from the protection that a buyer has on a seller, or the exchange of goods or services between two parties. Trade can not only be done with people from the same country, but also globally which is called international trade. The international trade market offers tougher competition. This also has an impact on creating more competitive prices. Currently cases of fraud in online trading applications are peaking due to the lack of knowledge of the public who only want high profits. The fraud caused the loss of the victims' assets while the perpetrators were sentenced to prison. Furthermore, this study aims to examine how legal protection is provided to victims of fraud and embezzlement in online trading applications. While the type of research used is normative law with the approach of statutory regulations, conceptual approach, and case approach. The research results obtained are that legal protection for victims so that the victims' rights are fulfilled and protected in accordance with the Consumer Protection Act and the concept of a restorative justice approach, several attempts by victims to obtain their property rights are obtained, namely compensation efforts based on acts against the law or default; efforts to apply for a merger of cases of compensation for damages; and efforts to apply for restitution to the court through the Witness and Victim Protection Agency.

**Keywords:** Legal Protection, Fraud, Trading Applications

### Pendahuluan

Perkembangan globalisasi di Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah perkembangan dalam bidang perekonomian dan bidang teknologi. Perkembangan teknologi informasi membuat sebuah perubahan dalam masyarakat. Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari karena berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan sehingga investasi secara

---

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

online itu mendukung dan perkembangannya secara pesat merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan kemajuan di bidang teknologi serta inovasi finansial telah menciptakan sebuah sistem yang kompleks, saling terkait antara subsektor keuangan baik dalam maupun luar negeri.(Hermansyah, 2015)

Trading dan Investasi memiliki sedikit perbedaan, karena pada dasarnya Trading adalah membeli dan menjual kembali aset, fokus di dalam dunia Trading adalah hal-hal teknis seperti harga, grafik dan pergerakan di dalamnya, Risiko di dalam dunia Trading pun sangat besar, karena pergerakan jual beli aset yang sangat cepat, namun di dalam dunia Trading penjualan aset aset hanya membutuhkan waktu beberapa detik bahkan hanya beberapa bulan saja, Capital Growth di dalam dunia Trading adalah membentuk profit jangka pendek, diperlukan analisis yang tepat dan akurat. agar dalam pembelian dan penjualan kembali mendapatkan profit yang menguntungkan. Berbeda dengan konsep pada investasi, Investasi adalah membeli dan menahan entitas itu untuk di jual kembali atau di kelola di kemudian hari, analisis yang dilakukan untuk investasi adalah cash flow, prospek perkembangan, laporan keuangan dan lain-lain, berbeda dengan Trading yang memiliki risiko besar, risiko investasi sangatlah kecil, karena investor akan menyeleksi secara detail untuk barang yang akan di jual sebagai investasi, dan juga aset yang menjadi investasi memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan profit, membutuhkan talhuna bahkan puluhan tahun. (Naldiya Rahmawati, 2022)

Trading merupakan serangkaian transaksi dari berbagai Inggris yang bermaksud melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing atau mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. (Kalsmir, 2010) Ada beberapa jenis trading yang populer dilakukan penggiat dunia finansial yaitu trading forex, Trading saham, trading binary, trading bitcoin dan lain-lain sebagainya. Forex (foreign exchange) trading merupakan jenis perdagangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan. (Srianto Doby Purnomo, 2013)

Sebagai orang yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang lama, tentu demi mendapatkan nilai tambah dan keuntungan di kemudian hari apabila mereka memilih untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, Trading bisa menjadi salah satu pilihan mereka. Trading disebut juga sebagai investasi jangka pendek dikarenakan trader melakukan jual beli aset dipasar digital, namun aset yang dimiliki hanya untuk interval pendek dan tidak dapat di nikmati hasilnya, Trader atau sebutan orang yang melakukan

Trading juga harus aktif dalam memantau kegiatan palsu untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual atau membeli saham agar mendapatkan profit yang memuaskan. (Salwidi Widodo, 2008)

Pasar forex dibuka hampir setiap hari 24 jam dalam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu (hari Senin-Jumat). Pasar yang terbuka dan bisa diakses kapan pun setiap hari hampir 24 (dua puluh empat) jam ini memberikan keuntungan untuk melakukan transaksi tanpa terganggu oleh adanya jam-jam kerja bagi para trader yang masih terkait dengan jam kerja perusahaan. (Frento T. Suharto, 2013)

Dalam transaksi perdagangan, tentunya ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Demikian pula dalam perdagangan forex, yang membedakan dalam hal ini adalah pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperakui oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai broker. Forex tergolong dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawat kawat.

Forex trading di Indonesia termasuk perdagangan berjangka yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan, forex trading diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki risiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan. (Ivanna Lalura Palara, 2020)

Meningkatnya kegiatan Trading di Indonesia belakangan ini yang didukung oleh para afiliasi aplikasi Trading di Indonesia yang memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas, Afiliasi adalah orang yang berperan mempromosikan pasar digital, entah itu influencer, selebritas atau youtuber yang dimintai mereka memiliki banyak Followers dan mereka dengan mudah mempromosikan pasar digital di masyarakat luas. Namun banyak masyarakat beralasan bahwa afiliasi saat ini justru merusak investasi Trading dan cenderung merugikan investor yang mungkin belum terlalu paham akan dunia Trading namun mereka sudah diiming-imingi profit yang luar biasa dari kegiatan Trading yang dilakukan oleh afiliasi.

"Influencer" adalah individu dengan pengikut signifikan di media sosial yang dibayar oleh suatu brand atau produk untuk mempromosikan produk mereka kepada pengikutnya, melalui produk dan perjalanannya gratis dan / atau pembayaran tunai per promosi. Tujuannya adalah untuk membujuk para pengikut untuk membeli produk semacam itu. Media sosial

populer pilihan untuk para influencer adalah Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube. Influencer memiliki keahlian untuk mempengaruhi pembelian keputusan orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi atau hubungan mereka dengan audiens mereka. Sebuah hal yang penting, bahwa orang-orang ini bukanlah ahli pemasaran yang sederhana, tetapi lebih merupakan aset hubungan sosial dimilikinya mereka dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan pemasarannya. (Dany Galrjito, 2022)

Di era perkembangan teknologi saat ini banyak orang yang mengalokasikan dana mereka untuk sesuatu yang mungkin menguntungkan dikemudian hari, maka dari itu banyak orang mengalokasikan dana mereka untuk investasi dengan cara Trading. Selain mudah dan bisa di kerjakan dirumah, Trading tetap harus menggunakan skill dan pengetahuan tentang naik turunnya harga di pasar modal, penjual dan pembeli dari aset digital yang tepat akan berpengaruh pada profit yang akan mereka dapatkan seperti yang dipaparkan oleh para afiliasi. Segala jenis Trading pasti terdapat kelemahan di dalamnya, seperti juga yang terdapat di Trading Binary yang sedang naik daun saat ini, para investor yang sudah menemukannya modal di platform yang mereka harapkan profit dari platform tersebut, ternyata tidak mengantisipasi izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang sah memberikan izin beroperasinya suatu platform yang berhubungan dengan keuangan dan nasional atau investor yang telah menemukannya modal.

Salah satu platform trading yang ilegal atau tidak mengantisipasi izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah trading jenis Binary option karena sering merugikan investor atau trader. Mulai dari keluhan tentang platform yang menjadi falsifikasi tidak kunjung memberikan dana investor yang sudah dijanjikan, membatalkannya penarikan dana secara sepihak, dan sering mengembalikan email atau telepon dan cenderung acuh oleh keluhan investor atau trader. Keluhan lainnya karena Trading Binary option berbasis internet, maka para trader atau investor akan dimintai tentang data pribadi seperti Salinan kartu kredit, sim dan paspor dan kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. dan keluhan terakhir yang sangat mengejutkan ialah platform tersebut bisa memanipulasi peralihan lunak perdagangannya untuk memalukannya harga dan ini berdampak kepada investor atau trader yang akan selalu kalah dan akan merugi.

Perizinan pasar komoditas diatur dalam pasal (1) angka 8 UU nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Balpebti atau badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tidak pernah memberikan izin untuk Trading jenis Binary option dari platform Perdagangan Berjangka Komoditi.

Indonesian pun akhirnya digemparkan oleh kasus Trading bodong berbasis Binary Option dengan platform Binomo berskala 14 korban yang sudah melaporkan kerugian mencapai 25 miliar rupiah 12 dari platform Quotex sebesar 325 miliar rupiah<sup>13</sup>. Jumlah yang sangat fantastis yang dipantau oleh afiliasi ini tidak lain dan tidak bukan ialah hasil mereka menggiring para followers mereka untuk mengikuti Trading yang mereka pasarkan di kanal media sosial mereka. Hampir 70% dari keuntungan platform yang dipantau ketika trader atau investor salah dalam menebak naik turun harga di dalam Trading binary option diberikan kepada afiliasi yang berhasil menjual orang-orang untuk ikut bermain menggunakan platform yang mereka tawarkan. Sungguh keuntungan yang dipantau dari penderitanya oranglain tidak lain adalah perbuatan yang sangat merugikan. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongan L Tobing secara tegas mengatakan keberadaan para afiliasi sebenarnya telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu jasa secara tidak benar, seolah-olah menawarkan suatu yang mengandung janji yang belum pasti. Ini kan janji-janji yang belum pasti, Hal ini sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, afiliasi juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini lantaran disebutkan di pasal 57 bahwa setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, dengan cara membujuk atau memberi hadiah di luar kewajaran.

Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang pasok modal juga menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi di pasar berjangka komoditi dan pasar modal. Saat ini memang belum ada yang mengatur tentang Perlindungan trader atau investor di era Trading online di Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasok Modal mungkin bisa menjadi acuan untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap trader atau investor yang melakukan aktivitas Trading di Indonesia. (Rahmadiyah Putri Nilasari, 2011)

Berdasarkan uraian di atas, isu yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan yang dipantau oleh korban penipuan pada Aplikasi Trading Binomo Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan Trading Binary Option serta Perlindungan hukum kepada para korban yang dirugikan, maka dari itu peneliti memutuskan

untuk mengalkal judul “Perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada Aplikasi Trading Binomo”.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari yakni buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan korban penipuan pada Aplikasi Trading Binomo. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menelusuri perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada aplikasi trading Binomo**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengusahakan mengalmakan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Secara sosiologi, perlindungan hukum terhadap korban dimaknai sebagai upaya negral untuk menjalin hubungan kepercayaan yang harmonis dengan walgal negral melalui perwujudan jalminal penegakan hukum. (Suhariyanto, 2018) Salah satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakannya atau langkah tegas terhadap pelaku balik secara pidana maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana penipuan investasi online khususnya aplikasi trading Binomo yang telah menimbulkan banyak korban.

Konsumen-konsumen yang mendapatkannya kerugian atau yang dapaat kital sebut sebagai korban Binomo sangat menggunakan produk dari penyedia jasa aplikasi trading Binomo sudah seharusnya mendapatkannya perlindungan hukum. Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negral Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jalminal, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya merupakan salah satu tujuan dalam Indonesia yang sebagai negara hukum. Pentingnya penjaminan hukum yang menyangkut perlindungan bagi pihak dari pemodal dan masyarakat, maka dari itu saat ini, diperlukan adanya pengalasan aktivitas investasi online dari otoritas publik pemerintah, yaitu Bapek (Badan Pengawas Pasar Modal). Lembaga inilah yang menjadi benteng terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar Modal. Dilakukannya secara mandiri pengimplementasian kewenangan Bapek sebagai lembaga yaitu preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, pembinaan dan pengalasan serta represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan sanksi. (Fualdi, 2011)

Berlakunya dalam investasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan tentunya menjadi pedoman khusus dan jaminan perlindungan hukum yang salah bagi pelaku pasar modal elektronik di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Dimyati dalam aktivitas investasi ataupun trading, keamanannya yang salah bagi pelaku dalam dunia pasar modal di Indonesia negara dihalangkannya dapat memberikan penegakan hukum. Melalui penegakan hukum preventif dan represif. (Dimyati, 2014)

Penjaminan hukum secara preventif yang salah melalui peraturan perundang-undangan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan tindak pidana atas investasi atau trading ilegal. Dalam hal perlindungan preventif, dapat dilakukan oleh pemberi informasi oleh pemerintah melalui media apapun, seperti contoh pemerintah melakukan sosialisasi mengenai kemungkinan kerugian yang akan terjadi apabila masyarakat tetap menggunakan produk jasa Binomo tersebut. (Nirmal Alfianita, 2022)

Perlindungan hukum preventif dalam mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penipuan investasi digital ini merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 28 menyatakan bahwa: "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

Otoritas Jasa Keuangan Kantor mendukung pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan investasi digital, Otoritas Jasa Keuangan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan perhimpunan dan pengetahuan mengenai bagaiaman berinvestasi yang baik sehingga tidak terjerumus dengan investasi ilegal, selain itu OJK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal, membantu melakukan upaya koordinasi antarlembaga yang berkerjasama dengan OJK dalam menangani penipuan kasus investasi digital ilegal. Instansi yang melakukan Kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi yaitu OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM; Penegak Hukum : Polri, Kejaksaan Agung; Pendukung : Kementerian Komunikasi dan Informatika, PPAITK

Sementara itu, penjaminan perlindungan hukum secara represif perlindungan represif dapat dilakukan dengan menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui menindaklanjuti laporan ataupun permintaan ganti kerugian yang dialami oleh korban kepada pihak penyedia jasa Binomo tersebut yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atau trader ataupun investor.

Perlindungan hukum represif ini merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian (penyidik), jaksa penuntut umum dan hakim untuk menegakkan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta melindungi hak-hak korban. Perlindungan represif yang dilakukan pihak kepolisian khususnya dalam melindungi hak korban ialah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan mengumpulkan alat dan bahan bukti untuk membuat lebih jelas pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan investasi digital.

Penjaminan perlindungan oleh OJK dialnggap sebagai tindakan menggugat platform online dan memperjualkan trader atau investor untuk mendapalkan ganti rugi akibat adanya tindak pidana pelanggaran dari sistem dalam platform online tersebut. Pemberian sanksi pidana, perdata dan administratif merupakan salah satu upaya represif perlindungan hukum bagi pelaku investasi online. Namun, saat ini belum terdapat formalitas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang membalas mengenai penegakan hukum bagi perusahaan sekuritas yang membuat platform online. Oleh karena itu, jenis-jenis penjaminan penegakan hukum yang diupayakan untuk diberikan kepada trader ataupun investor dapat memproteksi melalui hukum berbasis online ini berlandaskan pada Satgas Waspada Investasi, Dalam Perlindungan Investor yang dibingkai lembaga keuangan OJK, yaitu pada penjaminan.

Bentuk jalminaln perlindungan yalng salh balgi tralder altalu investor yalng memalnfnalaltkln plaltform online aldallalh kalrenal penggunaaln keralngkal kerjal alplikalsi yalng rumit telah dialtur dallalm peralturaln daln pedomaln yalng dominaln di Indonesial, khususnya Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 mengenali Perlindungan Konsumen,

Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1995 tentalng Palsalr Modall, Undalng-Undalng Nomor 19 Talhun 2016 tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2008 mengenali Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik, sartal Pengalmaalnaln yalng diberikaln oleh Balpepalm-LK daln Bursal Efek. Sehubungaln dengaln kewaljabaln plaltform investalsi altalu tralding yalng malsih belum mendalpaltkln legallitals terhalnalp penyalndalng dalnal yalng mengallalni kerugialn kalrenal menggunakan keralngkal kerjal alplikalsi pertukalraln salhalm online yalng berbalhalyal, tidalk aldal pedomaln yalng mengaltur secalral ketalt..

Alpalbilal perlindungan preventif tidalk dilalkukaln dengaln malksimall, malkal perlindungan represif yalng diberikaln kepaldal malsyalralkalt yalng sekalligus menjaldi korbaln dallalm kalsus Binomo halrus ditindalklnjut dengaln tegals. Perlindungan hukum represif yalng dalpalt diberikaln dalpalt melallui pemberialn salnksi terhalnalp Pihalk Binomo yalkni, Salnksi Pidalnal berupal pidalnal penjalral malupun dendal balgi pihalk Binomo, sartal Salnksi perdaltal berupal penggalntialn kerugialn balik malteriall malupun immalteriall balgi korbaln pengguna jalsal Binomo.

Perlinungaln hukum yalng alkaln diberikaln kepaldal korbaln dalri pengguna jalsal Binomo itu sendiri. Paldal dalsalrnyal, pralktek terhalnalp Binomo tersebut dilalralng dallalm Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 1997 tentalng Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi sebalgalimalnal telah diubah dengaln Undalng-Undalng Nomor 10 Talhun 2011 yalng mengaltur tentalng pralktik-pralktik perdalgalngaln yalng dilalralng, secalral khusus aldallalh mempengalruhi pihalk lalin (dallalm alrti ini aldallalh malsyalralkalt) untuk melalkukaln tralnsalksi dengaln calral membujuk altalu memberi halralpaln keuntungaln di luar kewaljalraln.

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum pidalnal terhalnalp korbaln tindalk pidalnal investalsi berbentuk tibal (2) malcalm, yalitu: Perlindungan preventif daln refresif. Paldal perlindungan hukum preventif yalng dilalkukaln oleh poldal lalmpung, otoritals jalsal keualngaln daln Yalyalsaln Lembalgal perlindungan konsumen lebih mengedepalnkln paldal proses pencegalhaln sebelum tindalk pidalnal tersebut terjaldi, yalitu berbentuk penyuluhaln hukum terkalt investalsi, malksud daln tujualn algalr pemalhalmaln malsyalralkalt mengenali investalsi lebih balik kedepalnnyal algalr tindalk pidalnal investalsi bodong dalpalt di minimallisir. Lallu paldal perlindungan hukum represif yalitu dengaln melalkukaln proses hukum alcalral pidalnal yalng berlalku demi mewujudkaln

cital-cital hukum sendiri. Dallalm hall ini penegalk hukum mengikuti peralturaln terdalpalt dallalm peralturaln altalu ketentualn yalng berkenalaln dengaln investalsi seperti paldal UndalngUndalng Nomor 19 Talhun 2016 tentaln Informalsi daln Traalsalksi Elektronik (UU ITE) daln Palsall 378 tentaln penipualn yalng terdalpalt didallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP)..

### **Daftar pustaka**

B Dimyalti. (2014). Perlindungaln Hukum Balgi Investor Dallalm Palsalr Modall.

Fualdi. (2011). Palsalr Modall Modern (Tinjualaln Hukum).

Nirmal Alfialnital. (2022). Perlindungaln Hukum Balgi Korbaln Binomo.

Suhalriyalnto. (2018). Perlindungaln Hukum Terhaldalp Kobaln Melallui Restitusi (Perspektif Filsalfalt, Teori, Normal, Daln Pralktek Peneralpalnnyal),.